

ABSTRAK

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 mengabulkan sejumlah permohonan uji materi terkait Undang- Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh beberapa serikat buruh, yang menganggap bahwa beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945. Dalam hal ini banyak perubahan yang diputuskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 tentang pengujian Undang- Undang Cipta kerja, salah satunya terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 akan membawa dampak besar pada perlindungan pekerja di Indonesia. Oleh karena itu, perlu diteliti bagaimana implikasi substansi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan pekerja dan konstruksi pengaturan ketentuan ketenagakerjaan yang mampu memberikan perlindungan terhadap pekerja.

Jenis penelitian ini penelitian normatif. Jenis penelitian ini dilakukan dengan meneliti sumber- sumber pustaka atau sekunder, yang mencakup bahan- bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan perundang- undangan, dan pendekatan konseptual. Analisa penelitian ini yakni analisis preskriptif yaitu untuk menyusun argumentasi berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

Hasil analisis ini menunjukkan, implikasi substansi Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023 terhadap perlindungan pekerja memberikan kepastian perlindungan yang lebih kuat terhadap hak- hak pekerja dalam suatu hubungan kerja, seperti penegasan batas maksimal PKWT selama 5 tahun dalam Undang- Undang, pengembalian hak istirahat mingguan yang sempat dihapus, ketentuan pesangon bersifat minimum, dan yang lainnya. Kemudian, konstruksi pengaturan ketentuan ketenagakerjaan dilakukan untuk memberikan perlindungan komprehensif terhadap pekerja dengan menitikberatkan pada perlindungan hak- hak pekerja secara adil, mulai dari pengutamaan tenaga kerja Indonesia dalam setiap sektor- sektor industri, membatasi jenis pekerjaan yang dapat menggunakan PKWT, melakukan pembatasan alih daya mengenai jenis dan bidang pekerjaan yang dapat ataupun tidak dapat dialihdayakan, penetapan upah yang layak, pengaturan waktu istirahat yang proporsional, hingga pengaturan PHK yang ketat dan pelaksanaan PHK yang hanya dapat dilakukan setelah melalui keputusan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Kata Kunci: Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023, Undang- Undang Ketenagakerjaan, Undang- Undang Cipta Kerja, Perlindungan Hak Pekerja

ABSTRACT

The Constitutional Court's Decision Number 168/PUU-XXI/2023 has granted several requests for judicial review related to the Job Creation Law submitted by several labor unions, which argue that some provisions in the Job Creation Law are contrary to the 1945 Constitution. In this case, many changes were decided by the Constitutional Court in Decision Number 168/PUU-XXI/2023 regarding the judicial review of the Job Creation Law, one of which relates to Termination of Employment (PHK). Decision Number 168/PUU-XXI/2023 will have a significant impact on worker protection in Indonesia. Therefore, it is necessary to investigate how the substance of Decision Number 168/PUU-XXI/2023 implicates worker protection and the construction of labor regulations that can provide protection for workers.

This type of research is normative research. This type of research is conducted by examining library or secondary sources, which include primary legal materials and secondary legal materials. The approaches used in this research are the regulatory approach and the conceptual approach. The analysis of this research is prescriptive analysis, which is used to formulate arguments based on the results obtained from the research.

The results of this analysis indicate that the substantive implications of the Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023 on the protection of workers provide a stronger assurance of protection for workers' rights in an employment relationship, such as the affirmation of the maximum limit for fixed-term contracts for a duration of 5 years in legislation, the restoration of weekly rest rights that had been abolished, minimum severance pay provisions, and others. Then, the construction of labor regulation provisions is carried out to provide comprehensive protection to workers by emphasizing the fair protection of workers' rights, starting with prioritizing Indonesian labor in every sector of industry, limiting the types of jobs that can use fixed-term employment contracts (PKWT), imposing restrictions on outsourcing regarding the types and fields of work that can or cannot be outsourced, establishing decent wages, regulating proportional break times, up to strict regulations on termination of employment (PHK) which can only be implemented after going through a decision from the Industrial Relations Dispute Settlement Agency (PPHI).

Keywords: Constitutional Court Decision Number 168/PUU-XXI/2023, Manpower Law, Job Creation Law, Protection of Workers' Rights.